

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA TAHUN  
2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAGETAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dapat tersusun naskah Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB PP dan PA) Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan yang disusun tiap tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaporkan dalam LKJIP tahun 2022 nanti.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini sebagai penjabaran / pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semua isi yang terkandung dalam Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Renstra dimaksud.

Demikian Rankir Rencana Kerja tahun 2022 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun – tahun yang akan datang.

Magetan, Juli 2021

KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA  
KABUPATEN MAGETAN

**Dra. FURIANA KARTINI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660421 199003 2 013

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	22
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	24
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	27
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	39
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	39
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V PENUTUP .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Magetan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja, kedudukan tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan yang secara umum adalah untuk mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang mempunyai anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya. Untuk melaksanakan tugas yang diembannya tersebut, Dinas PPKB PP dan PA menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai acuan / kerangka kerja dalam perencanaan anggaran dan penetapan kinerja tahun 2021.

Dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut indikator – indikator sarasannya. Selain itu juga diuraikan tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah dilakukan.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan 2018-2023
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perangkat Daerah) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
2. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas PPKB dan PPPA.
3. Menetapkan target kinerja Dinas PPKB dan PPPA.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

1. Menjamin keberlanjutan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas PPKB dan PPPA.
2. Memberikan pedoman bagi bidang-bidang yang ada di Dinas PPKB dan PPPA dalam rangka mencapai target Renstra.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Perkiraan Capaian Tahun 2021 dikaitkan dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 pada umumnya program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 Kabupaten Magetan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan		100	100	100	100	100		
Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan		1	1	1	100	1		
Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Koalisi Kependudukan		3	4	4	100	4		
Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelenggaraan DAK Bidang Pengendalian Penduduk		4	4	4	100	4		
Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program pembangunan lainnya di kampung KB	Persentase Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program pembangunan lainnya di kampung KB		100	100	100	100	100		
Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional KB	Persentase Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional KB dan Jumlah Kader PPKBD/Sub PPKBD yang menerima biaya operasional KIE dan honor pelaksanaan KIE		0	99,44	99,44	99,44	99,44		
<b>Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Lini Lapangan</b>	Cakupan tenaga Lini Lapangan yang kompeten		100	100	100	100	100		

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pelaksanaan Advokasi , KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	12	12	100	12		
Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub. PPKBD	Jumlah Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub.PPKBD		1375	1377	1377	100	1375		
<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0	27	27	100	0		
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		350	350	350	100	350		
<b>Program Keluarga Berencana</b>	Prosentase Capaian CPR		73,5	73	73	100	73,5		
Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsyarakatan	Jumlah Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsyarakatan		6	6	6	100	6		
Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE		110	110	110	100	110		
Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana		100	65	65	100	100		
Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB		8	8	8	100	8		
Biaya Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional pada Balai Penyuluhan KB		0	100	100	100	0		

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Biaya Operasional Distribusi Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Faskes Keluarga Berencana yang mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi		0	100	100	100	0		
<b>Program Bina Ketahanan Keluarga</b>	<b>Cakupamn Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>		75	71	71	100	75		
Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan		470	470	470	100	470		
<b>Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB</b>		75	55	55	100	75		
Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS		200	55	55	100	200		
<b>Program Kesehatan Reproduksi</b>	<b>Prevalensi Peserta Papsmear</b>		3,5	3	3	100	3,5		
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEAR)	Jumlah peserta Papsmear		700	225	225	100	700		
<b>Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB</b>	<b>Persentase Jangkauan Pelayanan KB</b>		100	100	100	100	100		
Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD	Jumlah Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD		78	132	132	100	78		

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah Alat Penyimpan Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB		13	8	8	100	13		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan		0	1	1	100	0		
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	Jumlah Pengadaan BKB Kit		22	15	15	100	22		
Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK)	Jumlah Pengadaan BKL Kit		22	15	15	100	22		
<b>Program Generasi Berencana</b>	<b>Median Usia Kawin Pertama Perempuan</b>		8,51	20	20	100	8,51		
Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba-Lomba PIK-R		5	6	6	100	5		
<b>Program Peningkatan peran serta dan kesertaan gender dalam pembangunan</b>	<b>Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta</b>		25	40	40	100	25		
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		180	160	160	100	180		
Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita		180	80	80	100	180		

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak</b>		80	100	100	100	80		
Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA		1	1	1	100	1		
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase Korban KDRT Yang mendapatkan Penanganan</b>		100	100	100	100	100		
Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG, Profil Data Gender dan Anak		1	1	1	100	1		
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban KDRT Yang difasilitasi		100	90	90	100	100		
<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>		100	100	100	100	100		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		9	9	9	100	9		

1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah		3	3	3	100	3		
Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA		200	3	3	100	200		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi</b>		100	100	100	100	100		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang dibeli		3	3	3	100	3		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara		19	7	7	100	19		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		8	8	8	100	8		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	81	81	100	80		
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100		
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat		1	1	1	100	1		
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur		100	100	100	100	100		

**Tabel Tabel. 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 Kabupaten Magetan**

NAMA PERANGKAT DAERAH : PPKB DAN PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43%						43%	100
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab./Kota</b>	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	2 Dokumen						2 Dokumen	100
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</i>	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2 Dokumen						2 Dokumen	100
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	43%						43%	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota</b>	<b>Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta</b>	<b>40 Peserta</b>						<b>40 Peserta</b>	<b>100</b>
<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40 Peserta						40 Peserta	100
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan</b>	<b>2 Dokumen</b>						<b>2 Dokumen</b>	<b>100</b>
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kab./Kota</b>	<b>Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan</b>	<b>1 Dokumen</b>						<b>1 Dokumen</b>	<b>100</b>
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab./Kota</i>	Jumlah Korban Kekerasan yang difasilitasi dan didampingi	1 Dokumen						1 Dokumen	100
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase tercapainya KLA</b>	<b>76%</b>						<b>76%</b>	<b>100</b>
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab./Kota</b>	<b>Persentase tercapainya KLA</b>	<b>76%</b>						<b>76%</b>	<b>100</b>
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab./Kota</i>	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab./Kota	1 Dokumen						1 Dokumen	100



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	<b>100</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, kinerja keuangan yang disusun tepat waktu	8 Dokumen						8 Dokumen	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	6 Dokumen						6 Dokumen	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan						14 Bulan	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Daerah	2 Dokumen						2 Dokumen	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik	12 Bulan						12 Bulan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan						12 Bulan	100
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>1 Paket</b>						<b>1 Paket</b>	100
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga	1 Paket						1 Paket	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan						12 Bulan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan (Outsorsing)	12 Bulan						12 Bulan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 Skor</b>						<b>80 Skor</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	3 Unit						3 Unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	5 Unit						5 Unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Unit						5 Unit	100
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Kependudukan</b>	<b>100%</b>						<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk</b>	<b>Jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</b>	<b>1 Kegiatan</b>						<b>1 Kegiatan</b>	<b>100</b>
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Kegiatan						1 Kegiatan	100
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga</b>	<b>2 Dokumen</b>						<b>2 Dokumen</b>	<b>100</b>
Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen						1 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	1 Dokumen						1 Dokumen	100
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten</b>	<b>100%</b>						<b>100%</b>	<b>100</b>
Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Bulan						12 Bulan	100
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan KKBP ( <i>DAK Non Fisik</i> )	Persentase Dukungan Manajemen BOKB dan Media KIE	100%						100%	100
Pengendalian Program KKBP ( <i>Biaya Umum Pendamping DAK Fisik</i> )	Persentase Penyelenggaraan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana	100%						100%	100
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten</b>	<b>73,02%</b>						<b>73,02%</b>	<b>100</b>
Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/Sub. PPKBD	100%						100%	100
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Penguatan Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBP untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Kegiatan						3 Kegiatan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberi Honorarium (Pembinaan)	1378 Orang						1378 Orang	100
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Capaian CPR</b>	<b>73,02 %</b>						<b>73,02 %</b>	<b>100</b>
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Capaian CPR</b>	<b>73,02 %</b>						<b>73,02 %</b>	<b>100</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota <b>(DAK Non Fisik)</b>	Jumlah Faskes yang terdistribusi Alokasi	37 Faskes						37 Faskes	100
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	200 Aks						200 Aks	100
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	20 Kasus						20 Kasus	100
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB <b>( DAK Fisik)</b>	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	24 Unit						24 Unit	100
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Calon Peserta KB yang mendapatkan Pelayanan KB	70 Orang						70 Orang	100
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya <b>(DAK Non Fisik)</b>	Jumlah Calon Akseptor yang terlayani KB MKJP	4591 Akseptor						4591 Akseptor	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta PapSmear yang terlayani	225 Akseptor						225 Akseptor	100
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak ( <i>DAK Non Fisik</i> )	Jumlah Balai penyuluhan KB yang mendapatkan Biaya Operasional	18 Balai Penyuluhan KB						18 Balai Penyuluhan KB	100
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB</b>	<b>Persentase Capaian CPR</b>	<b>73,02 %</b>						<b>73,02 %</b>	<b>100</b>
Penguatan Peran serta Organisasi Kemsyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemsyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB	3 Kegiatan						3 Kegiatan	100
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB ( <i>DAK Non Fisik</i> )	Prosentase Penyediaan Biaya operasional kegiatan KKBPK di Kampung KB	100%						100%	100
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Keluarga yang mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>	<b>65%</b>						<b>65%</b>	<b>100</b>
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga yang mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	65%						65%	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk dan mendapatkan Pembinaan	4 Kelompok						4 Kelompok	100
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) <b>(DAK Fisik)</b>	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana penyiapan kehidupan berkeluarga	20 Paket						20 Paket	100
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang mendapatkan Pembinaan dan Biaya Operasional	235 Kader						235 Kader	100
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) <b>(DAK Non Fisik)</b>	Persentase Pemberian Biaya Operasional Penanganan Stunting	100%						100%	100
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS )	Jumlah Peserta Kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120 Orang						120 Orang	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lau (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan Keluarga yang mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>	<b>65%</b>						<b>65%</b>	<b>100</b>
Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga yang mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	65%						65%	100
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pesert dalam rangka Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Orang						80 Orang	100
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	80 Orang						80 Orang	100
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Pameran Produk UPPKS	1 Kegiatan						1 Kegiatan	100



## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas PPKB PP dan PA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Perumahan Bappeda Tahun 2018-2023 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKB PP dan PA serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas PPKB PP dan PA sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi			Proyeksi	Catatan Penting
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>			0,22	0,21	0,20	0,20	0,22	0,168	0,168	0,20	
1.1	Total Fertility Rate (TFR)			2,17	2,17	2,16	2,15	2,17	2,16	2,10	2,15	
1.2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)			20,01	20,01	20,10	20,30	20,01	23,34	23,12	20,30	
1.3	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)			8,25	8,00	8,00	7,80		9,07	9,30	7,80	
2	<b>Indek Pemberdayaan Gender (IDG)</b>			61,35	61,35	63,36	61,37	61,35	61,36	63,36	61,37	
2.1	Partisipasi angkatan kerja perempuan			78,55	78,60	78,60	78,60	78,55	86,08	87,24	78,60	
2.2	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah			4,74	4,76	4,77	4,78	4,74	4,82	4,31	4,78	
2.3	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD			6,67	6,67	7,67	8,67	6,67	13,33	11,11	8,67	
2.4	Ratio KDRT			0,01	0,07	0,06	0,05	0,01	0,03	0,05	0,05	
2.5	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)			653,95	670	680	690	653,95	826,13	826,13	690	
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			95,25	76,92	77,01	77,25	65,21	76,92	63,7	77,25	

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan.

### **2.3.1 Pengaturan Kelahiran melalui Kesertaan ber KB**

Di Kabupaten Magetan, pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana telah berhasil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Magetan dan terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB dimana jumlah perempuan sebagai akseptor 97.86% dibandingkan akseptor laki-laki sebesar 2.14% selama tahun 2019.

Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan :

- (1) Pandangan umum tentang KB bahwa KB adalah Urusan Wanita
- (2) Rendahnya Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Alat Kontrasepsi Pria
- (3) Keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki,
- (4) Rendahnya kesadaran dan partisipasi Pria dalam memutuskan untuk ber KB.

Rendahnya kesadaran dan pelaksanaan KB laki-laki maka Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan Balai Pemyuluhan KB se Kabupaten Magetan untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia.

### 2.3.2 Kesadaran Tentang Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja dan Ibu-ibu

Di Kabupaten Magetan hampir di setiap kecamatan sudah terdapat kelompok-kelompok PIK Remaja baik yang dikelola oleh Desa maupun Sekolah-sekolah. Tetapi akibat kurangnya pembinaan serta fasilitas pendukung yang kurang memadai, maka kelompok PIK Remaja ini belum berfungsi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kenakalan remaja dan penyimpangan seksual di kalangan remaja dan siswa.

Untuk Ibu-ibu atau PUS yang sudah aktif seksual ternyata masih banyak yang belum paham tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim (pap smear). Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua kecamatan melaksanakan kegiatan pap smear diakibatkan animo masyarakat terhadap kegiatan pap smear masih rendah. Oleh karena itu ke depan perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara Dinas PPKB PP dan PA dengan lintas sektor untuk menyukseskan program pap smear ini.

### 2.3.3 Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

Di Kabupaten Magetan masih cukup banyak anak yang stunting, maka diperlukan Advokasi, Koordinasi dan KIE kepada pemangku kebijakan dan lintase sektor serta kepada masyarakat semua juga kader IMP guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Magetan, terutama pada Ibu Hamil, harus memeriksakan kehamilannya pada para media dan tetap memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan pada anaknya agar tidak stunting.

### 2.3.4 Pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)

Di Kabupaten Magetan masih cukup banyak pernikahan di usia muda, untuk itu perlu kiranya Program Kesehatan Rreproduksi Remaja menjadi Kurikulum di Sekolah, sehingga remaja paham akan kesehatan reproduksinya yang akhirnya tidak melakukan Sex sebelum Nikah dan Nikah Usia Muda, karena Nikah Usia Muda belum siap secara psikologi, emosi dan juga secara ekonomi yang banyak terjadi perceraian dan juga bisa terjadi KDRT, untuk itu maka akan dibentuk SSK (Sekolah Siaga

Kependudukan), yang juga Remaja akan sadar pengendalian Penduduk di Kabupaten Magetan.

#### 2.3.5 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Di kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok Bina Keluarga Balita yang tersebar di setiap Posyandu. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya fungsi kelompok BKB dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebabkan kader BKB masih banyak yang belum paham tentang fungsi BKB itu sendiri. Selain itu honor kader BKB tidak ada oleh pemerintah sangat minim dan belum merata, sehingga dalam bekerja sifatnya hanya sukarela saja. Ke depan Dinas PPKB PP dan PA akan memberikan fasilitas BKB Kit untuk semua kelompok BKB yang ada dan direncanakan setiap kelompok BKB akan mendapat dana operasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok-kelompok UPPKS/KUKM dengan bunga yang rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah sejak tahun 2017, Dinas PPKB dan PPPA tidak menyalurkan kembali Kredit Usaha Kelompok Mandiri disebabkan temuan BPK bahwa yang menyalurkan Kredit adalah lembaga dibawah OJK. Saat ini Perbup terkait dengan KUKM masih dalam proses. Direncanakan UPPKS akan dialihkan kembali sesuai Peraturan Bupati.

#### 2.3.6 Peningkatan Keadilan Gender serta Peningkatan Rasa Aman Bagi Perempuan dan Anak.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan keadilan Gender serta Peningkatan Rasa Aman bagi Perempuan dan Anak adalah kurangnya pemahaman kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyikapi permasalahan perempuan dan anak, dalam peningkatan kesejahteraan perempuan diperlukan pemberdayaan perempuan yang menyeluruh, terutama di wilayah pinggiran/pedesaan yang kerap kali perempuan menjadi tulang punggung keluarga, maka perlu melibatkan semua sektor dalam penanganannya.

Selain itu pemberdayaan kepada perempuan akan mengurangi kesenjangan Gender pada perempuan, sehingga menekan angka kekerasan yang mana masih banyak kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan karena malu dan menganggap aib keluarga, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal Perangkat Daerah atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Pada Rancangan Awal Perangkat Daerah ini, belum ada perubahan pagu anggaran baik program dan kegiatan setelah direview.

Tabel. 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022 Kabupaten Magetan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERITAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERITAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data Kependudukan</b>		100%		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data Kependudukan</b>		100%		
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>270.000.000</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>30.000.000</b>	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten	1 Kegiatan	270.000.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten	1 Kegiatan	30.000.000	
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga / Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</b>			<b>180.000.000</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga / Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</b>			<b>95.000.000</b>	
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten / Prosentase Capaian CPR</b>		<b>73%</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten / Prosentase Capaian CPR</b>		<b>73%</b>		
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>45.000.000</b>	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Kabupaten	12 bulan	100.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Kabupaten	12 bulan	45.000.000	
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di lini lapangan dan Penggerakan IMP</b>		<b>100%</b>	<b>1.187.000.000</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di lini lapangan dan Penggerakan IMP</b>		<b>100%</b>	<b>790.000.000</b>	
Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten	4 kali	205.000.000	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten	4 kali	50.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten	1378 peserta (PPKBD 235 peserta dan Sub. PPKBD 1143 peserta / 12 bulan	982.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten	1378 peserta (PPKBD 235 peserta dan Sub. PPKBD 1143 peserta / 12 bulan	740.000.000	
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>265.000.000</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan</b>	Kabupaten	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten	200 Akseptor	100.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten	200 Akseptor	50.000.000	
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten	20 Kasus	25.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten	20 Kasus	25.000.000	
Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Kabupaten	70 Orang	20.000.000	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Kabupaten	70 Orang	20.000.000	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten	225 Orang	120.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten	225 Orang	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100%	70.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100%	40.000.000	
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB/Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB/Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten	3 Kegiatan	70.000.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB/Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB/Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten	3 Kegiatan	40.000.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>		73%		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>		73%		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	315.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	175.000.000	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja	Kabupaten	4 kelompok	65.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja	Kabupaten	4 kelompok	20.000.000	

Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(PIK-R) Bina Lansia Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(PIK-R) Bina Lansia Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	235 Kader	210.000.000	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	235 Kader	140.000.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	120 orang	40.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	120 orang	15.000.000	
<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>95.000.000</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>50.000.000</b>	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi	Kabupaten	80 orang	30.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi	Kabupaten	80 orang	15.000.000	

Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	80 orang	30.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	80 orang	15.000.000	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten	1 kegiatan	35.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten	1 kegiatan	20.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta		43%		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta		43%		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan		2 Dokumen	40.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan		2 Dokumen	30.000.000	

Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan PUG				Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan PUG				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten	2 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten	2 Dokumen	30.000.000	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>40.000.000</b>	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten	40 Orang	75.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten	40 Orang	40.000.000	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Menurunnya Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan</b>		<b>1 Dokumen</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Menurunnya Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan</b>		<b>1 Dokumen</b>		
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	200.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Untuk tercapainya KLA</b>		<b>76%</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Untuk tercapainya KLA</b>		<b>76%</b>		
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non</b>	<b>Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</b>		<b>76%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non</b>	<b>Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</b>		<b>76%</b>	<b>100.000.000</b>	

<b>Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>80%</b>	<b>4.624.148.176</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>80%</b>	<b>2.912.034.493</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ckupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah / Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ckupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah / Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>60.000.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	8 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	8 Dokumen	25.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan	Kabupaten	6 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan	Kabupaten	6 Dokumen	35.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN / jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semestera n SKPD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.282.509.844</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN / jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semestera n SKPD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.930.834.493</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	12 Bulan	3.272.509.844	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	12 Bulan	1.925.834.493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Kabupaten	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Kabupaten	2 Dokumen	5.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>262.683.500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>209.600.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	3.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	123.183.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	100.000.000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten	12 Bulan	11.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten	12 Bulan	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	12 Bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	12 Bulan	11.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	12 Bulan	9.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	12 Bulan	8.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten	12 Bulan	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten	12 Bulan	2.100.000	
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 Bulan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 Bulan	75.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>566.100.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>564.600.000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	28.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	27.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	537.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	537.600.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan / Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>437.854.832</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan / Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>147.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	12 Bulan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	12 Bulan	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten	12 Bulan	37.000.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	19 Unit	322.854.832	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	19 Unit	50.000.000	



## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Renja tahun 2022 ini terdapat program/kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah Yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan PPPA pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2022, yang dihadiri oleh Dinas Lintas Sektor, , IpeKB , Forum Anak dan Kelompok Insan Genre

**Tabel 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Magetan**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PPKB PP DAN PA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			<b>Nihil</b>		

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

#### **3.1.1 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksanaan Program Nasional merupakan bagian Integral dari Pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa Program KBN merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan, dimana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, dimana Program KKBPK masuk didalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) pada butir ke 5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” pada fokus pertama (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana). Seluruh arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga harus mengacu pada butir ke 5 Nawacita tersebut dan telah tertuang di dalam RPJMN 2019-

2024 serta telah dikembangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2019-2024.

Penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga telah tertuang didalam RPJMN/Renstra BKKBN 2019-2024 dan pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN/Renstra tersebut (tahun 2015) BKKBN dituntut untuk dapat mencapai target/sasaran diantaranya : <sup>1)</sup> Persentase Laju pertumbuhan Penduduk 1,25, <sup>2)</sup> Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS 15-49 tahun target 1,94 realisasi 2,29 (84,72%), <sup>3)</sup> Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) target 65,24 realisasi 62,1 (95,19%) (all method), <sup>4)</sup> Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) target 7,54 realisasi 10,00 (75,40%), <sup>5)</sup> Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) target 31 realisasi 31,2 (99,36%) per 1000 kelahiran 15-19 , <sup>6)</sup> Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun target 20,9 realisasi 20,1 (96,17%), Penajaman-penajaman yang harus dilakukan tentunya juga harus tetap mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Bidang Kependudukan dan KB yang terdapat pada Buku I RPJMN 2019-2024 dimana BKKBN bertanggung jawab untuk melakukan:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan kependudukan, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana program KKBPK, serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KKBPK
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKBPK melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/ kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

### **3.1.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan.

Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagai Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai PERBUP Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua sektor pembangunan serta penilaian pelaksanaan.

Program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak, yang selama ini masih banyak mengalami kendala akibat bias gender yang dapat ditemukan pada semua bidang kehidupan, Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan bahkan mengambil porsi sangat penting dalam pembangunan manusia. Kesejahteraan akan dapat tercapai apabila kualitas hidup perempuan diperhatikan.

Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) berupaya juga untuk mengoptimalkan perempuan dalam keikut-sertaannya di dalam pembangunan. Melalui Peraturan Pemerintah No 47/2009, Tugas pokok dan fungsi Kementerian PP dan PA adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan PA;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang PP dan PA.

Arah Prioritas Pembangunan Bidang PP dan PA di Daerah adalah:

1. Pelaksanaan PUG, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah dengan piloting beberapa bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan pekerjaan umum.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak,  
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Meningkatkan Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Tumbuh kembang Anak upaya peningkatan tumbuh kembang anak melalui Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor? OPD dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pengembangan Kota Layak Anak melalui Forum Anak, Desa Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak serta Kebijakan Ramah Anak.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

**Tabel. 3.1**  
**Target, Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-					
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengendalian Penduduk		1.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	
				1.1.1	Fotal Fertility Rate (TFR)	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	
				1.2	1.2.1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	20.10	20.30	20.50	20.80	21.00
					1.2.2	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)	8,00	8,00	7,80	7,80	7,50
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	2.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.1	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	61,35	63,36	61,37	61,38	61,39	
				2.1.1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	
				2.2.1	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,76	4,77	4,78	4,79	4,80	
				2.3.1	Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD	6,67	7,67	8,67	9,67	10,67	

		2.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2.4.1	Rasio KDRT	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
				2.5.1	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	670	680	690	700	710
				2.6.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	76,92	77,01	77,25	77,55	77,91



## **BAB. IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Program Kegiatan**

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2019;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah tahun 2019;
- c. Hasil review terhadap rancangan Perangkat Daerah tahun 2022;
- d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi;
- f. Isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi Perangkat Daerah selama tahun 2019 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB PP dan PA pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

**TABEL 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MJU RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data Kependudukan</b>		100%			100%		
	<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>30.000.000</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>30.000.000</b>	
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten	1 Kegiatan	30.000.000		Kabupaten	1 Kegiatan	30.000.000
	<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga / Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</b>			<b>95.000.000</b>			<b>95.000.000</b>	
	2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000		Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten	1 Dokumen	75.000.000		Kabupaten	1 Dokumen	75.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten / Prosentase Capaian CPR</b>		73%				73%	
	2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar budaya lokal dalam pencitraan program KKBPk</b>		12 Bulan	45.000.000			12 Bulan	45.000.000
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar	Kabupaten	12 bulan	45.000.000		Kabupaten	12 bulan	45.000.000
	2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di lini lapangan dan Penggerakan IMP</b>		100%	790.000.000			100%	790.000.000
	2.14.03.2.02.03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten	4 kali	50.000.000		Kabupaten	4 kali	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten	1378 peserta (PPKBD 235 peserta dan Sub. PPKBD 1143 peserta / 12 bulan	740.000.000		Kabupaten	1378 peserta (PPKBD 235 peserta dan Sub. PPKBD 1143 peserta / 12 bulan	740.000.000
	<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten	200 Akseptor	50.000.000		Kabupaten	200 Akseptor	50.000.000
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten	20 Kasus	25.000.000		Kabupaten	20 Kasus	25.000.000
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Kabupaten	70 Orang	20.000.000		Kabupaten	70 Orang	20.000.000
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten	225 Orang	40.000.000		Kabupaten	225 Orang	40.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten	3 Kegiatan	40.000.000		Kabupaten	3 Kegiatan	40.000.000
	<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga</b>		<b>73%</b>				<b>73%</b>	
	<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>100%</b>	<b>175.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>175.000.000</b>
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kabupaten	4 kelompok	20.000.000		Kabupaten	4 kelompok	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	235 Kader	140.000.000		Kabupaten	235 Kader	140.000.000
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	120 orang	15.000.000		Kabupaten	120 orang	15.000.000
	<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>3 Kgiatan</b>	<b>50.000.000</b>			<b>3 Kgiatan</b>	<b>50.000.000</b>
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	80 orang	15.000.000		Kabupaten	80 orang	15.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten	80 orang	15.000.000		Kabupaten	80 orang	15.000.000
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten	1 kegiatan	20.000.000		Kabupaten	1 kegiatan	20.000.000
	<b>02.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	<b>02.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta</b>		<b>43%</b>				<b>43%</b>	
	<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</b>		2 Dokumen	<b>30.000.000</b>			2 Dokumen	<b>30.000.000</b>
	02.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten	2 Dokumen	30.000.000		Kabupaten	2 Dokumen	30.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		1 Dokumen	40.000.000			1 Dokumen	40.000.000
	02.08.02.2.0 2.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten	40 Orang	40.000.000		Kabupaten	40 Orang	40.000.000
	02.08.03.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan Kepada Perempuan		1 Dokumen				1 Dokumen	
	02.08.03.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000
	02.08.03.2.0 3.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000		Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000
	02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA		76%				76%	
	02.08.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		76%	100.000.000			76%	100.000.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02.08.06.2.0 1.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000		Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000
	<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>80%</b>	<b>2.912.034.493</b>			<b>80%</b>	<b>2.912.034.493</b>
	<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ckupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah / Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>60.000.000</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>60.000.000</b>
	2.14.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	8 Dokumen	25.000.000		Kabupaten	8 Dokumen	25.000.000
	2.14.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan	Kabupaten	6 Dokumen	35.000.000		Kabupaten	6 Dokumen	35.000.000
	<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN / jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.930.834.493</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>1.930.834.493</b>
	2.14.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	12 Bulan	1.925.834.493		Kabupaten	12 Bulan	1.925.834.493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	Kabupaten	2 Dokumen	5.000.000		Kabupaten	2 Dokumen	5.000.000
	<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>209.600.000</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>209.600.000</b>
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	3.500.000		Kabupaten	12 Bulan	3.500.000
	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten	12 Bulan	100.000.000		Kabupaten	12 Bulan	100.000.000
	2.14.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten	12 Bulan	10.000.000		Kabupaten	12 Bulan	10.000.000
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten	12 Bulan	11.000.000		Kabupaten	12 Bulan	11.000.000
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	12 Bulan	8.000.000		Kabupaten	12 Bulan	8.000.000
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten	12 Bulan	2.100.000		Kabupaten	12 Bulan	2.100.000
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 Bulan	75.000.000		Kabupaten	12 Bulan	75.000.000
	<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>564.600.000</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>564.600.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	27.000.000		Kabupaten	12 Bulan	27.000.000
	2.14.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	537.600.000		Kabupaten	12 Bulan	537.600.000
	<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan / Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>147.000.000</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>147.000.000</b>
	2.14.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	12 Bulan	60.000.000		Kabupaten	12 Bulan	60.000.000
	2.14.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten	12 Bulan	37.000.000		Kabupaten	12 Bulan	37.000.000
	2.14.01.2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	19 Unit	50.000.000		Kabupaten	19 Unit	50.000.000
						<b>4.542.034.934</b>				<b>4.542.034.934</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra Dinas PPKB PP dan PA 2018 – 2023 secara tahunan. Rancangan Rencana Kerja mempunyai nilai guna yang penting karena keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2022 dan Perjanjian Kinerjanya. Selain itu Rancangan Akhir Rencana Kerja ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Tupoksi dan pencapaian kinerja selama tahun 2022 nanti.

Kedepan diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Magetan,        Juli 2021

KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA  
KABUPATEN MAGETAN

**Dra. FURIANA KARTINI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660421 199003 2 013